
ANALISIS PENGENDALIAN INTERN ATAS PIUTANG USAHA PADA PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) CABANG JAMBI

Oleh

Marnas¹, Laila Farhat², Abdul Wahab Daeng³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi

Email: ¹marnasnazir@gmail.com, ²lailafarhat241@gmail.com

Article History:

Received: 19-11-2023

Revised: 15-12-2023

Accepted: 24-12-2023

Keywords:

Pengendalian Intern,
Piutang, Perusahaan
Perdagangan Indonesia
(Persero).

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern piutang usaha pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Jambi dan untuk melakukan analisis dan evaluasi penerapan sistem pengendalian intern piutang usaha pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Jambi apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian intern yang baik. Adapun metode penelitiannya dengan cara mengambil data primer yang didapat dari wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan objek yang diteliti dan juga pengambilan data sekunder melalui laporan keuangan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan analisa data dengan metode deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data-data yang berupa informasi yang sebenarnya yang terjadi dilapangan dengan teori yang relevan sebagai pembanding dan diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dan pembahasan adalah pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Jambi pengendalian intern piutang usaha belum sesuai dengan unsur-unsur pengendalian intern yang baik. Struktur organisasi perusahaan ini cukup memadai, namun belum terlihat adanya pemisahan tugas secara tegas sehingga terjadi rangkap tugas.

PENDAHULUAN

Setiap badan usaha baik berbentuk perseroan, firma, koperasi, dan lain-lain mempunyai tujuan utama untuk mencapai laba yang maksimal. Laba yang maksimal dapat diperoleh melalui peningkatan volume penjualan, maka semakin besar pula laba yang akan diperoleh. Penjualan merupakan unsur utama dalam memperbesar laba disamping unsur-unsur lain seperti pendapatan sewa, pendapatan bunga dan lain sebagainya. Piutang usaha suatu perusahaan pada umumnya merupakan bagian terbesar dari aktiva lancar serta bagian terbesar dari total aktiva perusahaan, karena itu bila jumlah piutang usaha terlalu besar akan menimbulkan resiko sebagian piutang tak tertagih, akan memerlukan tambahan biaya penagihannya, hal ini akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. begitu pula sebaliknya jika piutang usaha terlalu kecil menunjukkan kebijaksanaan penjualan kredit yang dilakukan perusahaan terlalu ketat, sehingga tingkat penjualan yang dicapai menjadi rendah dan akhirnya laba yang diperoleh juga akan menjadi kecil.

Pengendalian intern terhadap piutang usaha ini sangat penting diterapkan, karena

kecurangan dalam suatu siklus kerja sangat sering terjadi sehingga dapat merugikan perusahaan. Kecurangan yang mungkin terjadi pada bagian piutang usaha adalah tidak mencatat pembayaran dari debitur dan mengantongi uangnya, menunda pencatatan piutang dengan melakukan *cash lapping*, melakukan pembukuan palsu atas mutasi piutang, dan lain sebagainya. Pengendalian intern merupakan salah satu cara yang digunakan dalam mengantisipasi kecurangan. Pengendalian intern perusahaan merupakan suatu rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, menjaga asset, memberikan informasi yang akurat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) – PT PPI yang dikenal juga sebagai “ITC” singkatan dari “Indonesia Trading Company” merupakan satu-satunya BUMN trading company di Indonesia. PT. PPI yang bergerak di perdagangan umum meliputi ekspor, impor, dan distribusi seperti bahan bangunan (semen, aspal, seng, produk besi/baja), bahan kimia berbahaya (TEA, borax, sodium sianida), produk konsumsi dan farmasi (transamin, wismilak, aguarial, minyak kita, aqua), produk unilever, pupuk & pestisida, pupuk petrokimia gresik, pupuk Kalimantan timur, pupuk sriwijaya, pupuk kujang, dharmasip 50 EC, dharmafur 3 G, dharmasan 600 C, dharmabas 50 EC, produk pertanian dan hortikultular (gula putih, bawang putih, bawang merah, beras biasa, beras ketan), perdagangan internasional (kerajinan tangan rotan dan kayu olahan). Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) memiliki cabang diseluruh Indonesia, salah satunya Provinsi Kota Jambi. Dalam penjualan sebagian produk ini dilakukan melalui system kredit, sehingga PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) memiliki jumlah piutang yang cukup besar. Oleh karena itu, kebutuhan akan pengendalian intern terhadap piutang usaha perusahaan merupakan hal yang wajib karena piutang usaha menjadi urat nadi bagi perusahaan. Dari laporan keuangan perusahaan tahun 2018-2022 terlihat laporan tingkat penjualan barang yang dilakukan secara tunai maupun kredit, seperti terlihat dalam tabel berikut ini

Tabel 1. PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Jambi Tingkat Penjualan Barang Tahun 2018-2022 (Dalam Rupiah)

No	Tahun	Penjualan Tunai	Penjualan Kredit	Total Penjualan
1	2018	10.559.000.000	15.141.000.000	25.700.000.000
2	2019	10.800.500.000	18.199.500.000	29.000.000.000
3	2020	11.500.000.000	25.300.000.000	36.800.000.000
4	2021	11.750.800.000	27.799.200.000	39.550.000.000
5	2022	11.950.000.000	30.850.000.000	42.800.000.000
	Jumlah	56.560.300.000	117.289.700.000	173.850.000.000
			0	0

Sumber : PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) CABANG JAMBI, 2022

Berdasarkan data tabel 1 diatas terlihat total penjualan tahun 2018 sebesar Rp. 25.700.000.000 yang terdiri dari penjualan tunai sebesar Rp. 10.559.000.000 dan penjualan kredit sebesar Rp. 15.141.000.000 sampai dengan tahun 2022 penjualan tunai sebesar Rp. 11.950.000.000 dan penjualan kredit Rp. 30.850.000.000 hingga mencapai total penjualan sebesar Rp. 42.800.000.000 dan disini terlihat proporsi penjualan kredit pada tahun 2018

tahun 2022 mengalami kenaikan.

Pengendalian intern pengumpulan piutang usaha dimulai dari penerimaan order penjualan, kemudian persetujuan atas order, persetujuan pemberian kredit, pengiriman barang, pembuatan faktur, verifikasi faktur, pembukuan piutang, penagihan piutang, yang akhirnya akan mempengaruhi saldo kas atau bank. Dalam hal ini harus diperhatikan pula retur penjualan secara periodik harus dibuat perincian piutang menurut golongan usianya untuk menentukan tindakan apa yang perlu dilakukan dan menilai apakah bagian kredit dan bagian inkanso telah bekerja dengan efisien. Kecurangan atau kesalahan yang mungkin dapat terjadi, dan jika dilakukan dengan terus menerus, maka akan sulit bagi masing-masing personil untuk mengingat tanggal jatuh tempo pembayaran yang dilakukan konsumen, yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya jumlah piutang tak tertagih, seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 2. Saldo Piutang dan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember Tahun 2018-2022
(Dalam rupiah penuh)**

Tahun	Saldo Piutang	Piutang Tak Tertagih	Persentase(%) Piutang Tak Tertagih
2018	755.000.000	25.800.000	3,41%
2019	719.200.000	27.500.000	3,82%
2020	590.000.000	29.700.000	5,04%
2021	525.500.000	31.400.000	5,98%
2022	490.700.000	32.500.000	6,62%

Sumber : PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) CABANG JAMBI, 2022

Berdasarkan pada tabel 2 diatas dimana jumlah piutang tak tertagih pada tahun 2018 sebesar Rp. 25.800.000 meningkat menjadi Rp. 32.500.000 hingga tahun 2022 dan mengalami kenaikan presentase yang berbanding dengan saldo piutang yaitu, 3,41% di tahun 2018 menjadi 6,62% pada tahun 2022. Hal ini dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan dan jika terjadi secara terus menerus dan meningkat akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Analisis

Menurut Jimmy L.Goal (2008:73) analisis sistem adalah sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan kesempatan-kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.

2. Pengertian Pengendalian Intern

Menurut Hery (2013: 159) pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/ undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. I Cenik Ardana dan Hendro Lukman (2016 : 75) pengendalian

internal mempunyai banyak arti tergantung dari latar belakang orang yang menafsirkannya. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan kerancuan pemahaman di antara para pelaku bisnis, legislator, aparat pemerintah, aparat pengawas, auditor dan sebagainya. Masalah menjadi tambah kompleks bila istilah “pengendalian internal” tersebut belum dirumuskan dengan jelas, dijabarkan secara tertulis, dan diberi landasan hukum yang kuat.

menurut V. Wiratna Sujarweni (2015 : 69) Sistem pengendalian intern adalah suatu sistem yang dibuat untuk member jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam perusahaan. Sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (2016:129) meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang di koordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, pengertian pengendalian intern tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah prosedur-prosedur dan metode yang dijalankan oleh suatu organisasi dalam mengawasi seluruh aktivitas perusahaan untuk melindungi aktiva perusahaan, menghasilkan informasi yang akurat dan menjamin telah ditaatinya kebijakan yang dibuat oleh manajemen sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan penyelewengan.

3. Pengertian Piutang Usaha

Dalam buku Pengantar Akuntansi Edisi Keempat, Firdaus A. Dunia (2013: 189) “Piutang usaha adalah klaim dalam bentuk uang terhadap perusahaan atau perseorangan. Piutang ini terutama timbul dari penjualan barang dan jasa secara kredit dan peminjaman uang”. Menurut Rudianto (2012: 210) Piutang adalah klaim perusahaan atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi dimasa lalu.

Menurut Efraim Ferdinan Giri (2014 : 129) piutang dalam arti luas meliputi semua tuntutan kepada pihak tertentu yang terjadi dari usaha pokok perusahaan, biasanya berkaitan dengan pihak di luar perusahaan. Menurut Slamet Sugiri Sodikin (2013 :45) piutang adalah tagihan kepada pelanggan dari transaksi usaha yang tidak dilengkapi dengan instrument kredit berupa wesel, promes, ataupun aksep dan akan diterima dalam bentuk uang tunai dimasa mendatang. Sedangkan definisi piutang Menurut Hery (2013 : 181) “piutang adalah mengacu pada sejumlah tagihan yang akan diterima perusahaan (umumnya dalam bentuk kas) dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit (untuk piutang pelanggan yang terdiri atas piutang usaha dan memungkinkan piutang wesel) memberikan pinjaman, maupun sebagai akibat kelebihan pembayaran kas kepada pihak lain”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa piutang adalah tagihan berupa uang, barang atau jasa kepada perusahaan atau individu sebagai bentuk pelunasan atas semua transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit dengan waktu penagihan yang sudah disepakati pada saat transaksi sebelumnya.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Jambi yang beralamat di Jl. P. Hidayat No. 30 Paal V Kotabaru, Jambi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dapat dipahami dalam penelitian ini digunakan dengan metode :

- a. Wawancara, Yakni dengan melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Seperti wawancara dengan manajer cabang, kepala bagian piutang, dsb.
- b. Dokumentasi, Yakni melalui pencatatan dan *fotocopy* data yang diperlukan.
- c. Teknik observasi, Yakni dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan atau pun prosedur kerja yang berhubungan dengan objek penelitian, seperti prosedur survey, prosedur penagihan piutang, dsb.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif. Penelitian berbentuk deskriptif adalah penelitian dengan pendekatan spesifik untuk mengungkapkan fakta dalam hubungan sebab akibat, bersifat eksploratif untuk mencari keterangan apa sebab terjadinya masalah, bagaimana memecahkannya. Akan tetapi sifatnya hanya mendalam pada satu peristiwa.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Adalah berupa data yang diperoleh langsung dari perusahaan melalui wawancara dengan manajer cabang, kepala bagian piutang, kepala bagian keuangan, dan karyawan yang terkait langsung dengan objek yang diteliti, dan kegiatan observasi yang kemudian akan diolah penulis.

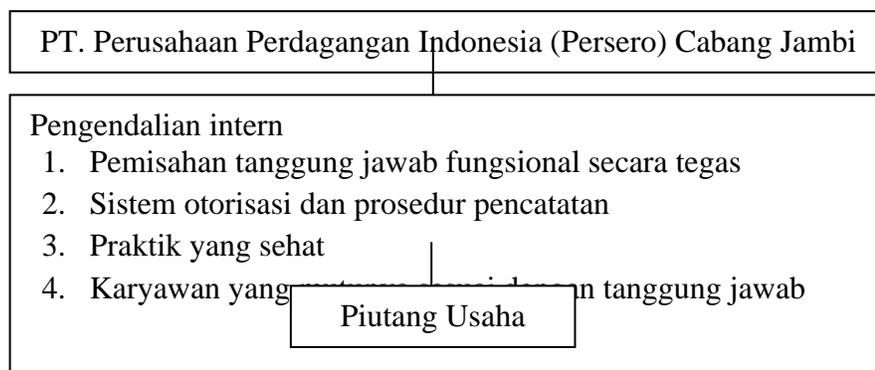
b. Data sekunder

Adalah berupa data yang dikumpulkan melalui catatan dan dokumen resmi perusahaan dan data yang telah diolah seperti sejarah singkat perusahaan, kuesioner pengendalian intern terhadap piutang usaha, memo internal, struktur organisasi, dan dokumen lainnya.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif yaitu analisis deskriptif yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa tersebut, analisis ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan social berdasarkan kondisi realitas dan natural setting yang holistis, kompleks dan rinci yang sifatnya menjelaskan secara uraian dalam bentuk kalimat.

6. Kerangka Berfikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian teoritis dari data yang dikumpulkan dari hasil penelitian pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Jambi mengenai pengendalian intern atas piutang usaha, maka penulis akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan Pengendalian Intern dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi piutang sesuai dengan unsur-unsur pengendalian intern tersebut. Analisis terhadap pengendalian intern atas piutang usaha ini didasarkan pada unsur-unsur pengendalian intern, yaitu :

1. Struktur Organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, hutang, pendapatan, dan biaya
3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi bagian organisasi
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya

Oleh karena itu unsur pokok pengendalian intern berhubungan dengan keempat kategori diatas, maka di dalam pembahasan pengendalian intern piutang pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Jambi akan dibahas sesuai dengan unsur-unsur pengendalian intern tersebut. Komponen-komponen Pengendalian Intern pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Jambi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional Secara Tegas

Struktur organisasi adalah mekanisme formal yang mengisyaratkan bagaimana suatu organisasi dikelola. Struktur organisasi juga menunjukkan kerangka serta susunan, perwujudan pola hubungan yang tetap diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau porsi-porsi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam satu organisasi. Dalam penyusunan struktur organisasi terdapat kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan agar struktur organisasi sedemikian rupa dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan secara baik.

Kriteria pokok untuk menentukan struktur organisasi yang ada di PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Jambi dikatakan baik, apabila memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Dalam organisasi harus dipisahkan antara fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi.
- b) Tidak ada satu departemen atau bagian yang diberi tanggungjawab untuk melakukan transaksi dari awal sampai akhir
- c) Memiliki bentuk struktur organisasi yang sederhana dan fleksibel, dalam arti bila ada perluasan tidak akan mengganggu susunan yang sudah ada secara berarti
- d) Masing-masing bagian dalam organisasi mempunyai kedudukan yang bebas dan tidak memihak

Berkaitan dengan piutang, struktur organisasi menunjukkan adanya penanganan piutang oleh bagian (unit) tersendiri. PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Jambi telah memiliki struktur organisasi yang jelas. Namun dalam prakteknya PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Jambi belum melakukan pemisahan tanggungjawab fungsional secara tegas, dimana masih terjadi perangkapan tugas antara fungsi dengan fungsi yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari pembagian fungsi dan tanggungjawab bahwa fungsi yang melakukan pencatatan piutang dilakukan oleh bagian pembukuan atau fungsi akuntansi, sementara itu fungsi ini juga merangkap sebagai fungsi kas yang bertugas menerima pembayaran dari pelanggan.

Dengan terjadinya perangkapan tugas tersebut kemungkinan terjadinya manipulasi pencatatan piutang yang dikenal dengan Lapping bisa terjadi. Lapping adalah bentuk kecurangan dengan cara memanipulasi pencatatan piutang dengan menunda pencatatan penerimaan kas dari debitur. Menurut penulis pemisahan tugas dan fungsi belum terselenggara dengan baik karena masih terdapat perangkapan tugas. Dengan adanya perangkapan tugas ini dapat membuka kesempatan terjadinya kecurangan-kecurangan. Pemisahan fungsi-fungsi ini sangat penting, agar catatan piutang dapat dijamin ketelitiannya dan keandalannya serta kekayaan perusahaan (piutang) dapat terjamin keamanannya.

2. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kekayaan, Hutang, Pendapatan, dan Biaya

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat system yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi dalam organisasi. Dilihat dari sistem wewenang pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Jambi sudah ada pembagian wewenang dan tanggung jawab yang baik, hal ini bisa dilihat dari struktur organisasi. Tetapi dalam pelaksanaannya belum begitu jelas, perangkapan tugas masih terjadi, sehingga hal ini mengakibatkan keraguan dan keamanan kekayaan perusahaan, kebenaran dan keandalan data akuntansi yang dicatat sesuai dengan prosedur pencatatan yang dilakukan.

Dilihat dari prosedur pencatatan piutang, prosedur ini bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan pada setiap debitur. Mutasi piutang ini disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan pelunasan, piutang dari debitur, dan penghapusan piutang. Pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Jambi, didalam penyajian neracanya mereka tidak menyajikan cadangan untuk kerugian piutang tak tertagih, karena penjualan kredit yang mereka lakukan berdasarkan surat perjanjian sehingga kerugian piutang tidak ada. Dengan tidak disajikannya perkiraan cadangan kerugian piutang berarti

analisis umur piutang tidak dibuat, sehingga jumlah piutang-piutang yang meningkat mereka bebankan pada perkiraan piutang. Bisa dilihat juga peningkatan jumlah piutang yang cukup besar dikarenakan keterlambatan pelunasan piutang sehingga piutang-piutang yang ada mengalami kemacetan. Untuk melaporkan piutang dalam neraca adalah sebesar jumlah yang akan direalisasikan yaitu jumlah yang diharapkan akan dapat tertagih, jumlah piutang yang diharapkan dapat tertagih dihitung dengan mengurangi jumlah yang diperkirakan akan dapat ditagih kepada jumlah piutang, karena neraca disusun setiap akhir periode maka setiap tahun perlu dihitung jumlah kerugian piutang. Kerugian piutang ini dibebankan pada periode yang bersangkutan sehingga dapat dihubungkan antara kerugian piutang dengan penjualan yang mengakibatkan timbulnya piutang tersebut.

Selain itu sistem akuntansi yang diterapkan oleh PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Jambi belum berjalan dengan baik, karena dalam hal ini bagian pembukuan atau fungsi akuntansi yang berfungsi melakukan pencatatan terjadinya piutang juga merangkap sebagai penerima atas pembayaran piutang oleh pelanggan. Tugas yang merangkap ini akan memungkinkan terjadi banyak kesalahan dalam pencatatan, sehingga laporan akhir yang dihasilkan akan menjadi salah. Oleh karena itu seharusnya dalam penempatan bagian fungsi-fungsi harus jelas sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam sistem pengendalian intern sehingga dapat meminimalkan kesalahan-kesalahan yang ada dalam piutang tersebut dan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan.

3. Praktek yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi tiap Bagian Organisasi

Pembagian tanggungjawab fungsional dan system wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktek yang sehat dalam pelaksanaannya. Untuk menciptakan praktek yang sehat dalam transaksi piutang, maka harus ada cara-cara yang ditempuh oleh PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Jambi yaitu :

Faktur penjualan dan tembusannya serta dokumen-dokumen pendukung pada transaksi penjualan barang kepada pelanggan harus digunakan sebagai dasar untuk membebani rekening pelanggan. Secara periodik diadakan rekonsiliasi antara catatan dalam buku pembantu piutang dengan rekening control yang ada dalam buku besar. Pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Jambi, cara-cara yang ditempuh dalam menciptakan praktek yang sehat secara umum belum dapat memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan perusahaan, seperti tidak diadakannya rotasi jabatan dibagian piutang dan tidak dilakukannya pemeriksaan dadakan oleh Direktur Utama atau yang berwenang. Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi karyawan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan diantara mereka dapat dihindari dan pemeriksaan mendadak yang dilakukan bisa bermanfaat untuk mengetahui kecurangan yang dilaksanakan oleh karyawan, karena dengan adanya pemeriksaan secara mendadak tidak memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melakukan pembenahan terlebih dahulu terhadap laporan-laporan yang akan diperiksa.

4. Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya

Pegawai yang kompeten merupakan elemen terpenting dari pengendalian intern yang telah dipersiapkan. Untuk itu manajemen harus menempatkan karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini manajemen dapat mengadakan

seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Pengembangan pendidikan dan pelatihan karyawan harus sesuai dengan perkembangan tuntutan pekerjaannya. Pada kenyataan memang jumlah karyawan yang dimiliki oleh PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Jambi memang sedikit yaitu 11 orang karyawan.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Struktur organisasi perusahaan ini cukup memadai, namun belum terlihat adanya pemisahan fungsional secara tegas hingga terjadi rangkap tugas, seperti fungsi kasir merangkap sebagai fungsi akuntansi
2. Dokumen dan catatan piutang yang dilaksanakan oleh perusahaan ini cukup memadai, karena perusahaan telah menyelenggarakan buku jurnal penerimaan kas, buku besar piutang dan surat pernyataan bagi debitur yang menunggak
3. Kegiatan terhadap administrasi piutang belum berjalan dengan baik, karena tidak adanya rotasi jabatan untuk piutang tersebut dan tidak adanya pemeriksaan dadakan yang dilakukan dari perusahaan pusat untuk menilai kualitas pegawainya tersebut.
4. Dari beberapa kesimpulan tersebut, pengendalian intern terhadap piutang usaha yang dilakukan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Jambi belum sesuai dengan unsur-unsur pengendalian intern yang baik.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan maka, penulis mengemukakan beberapa saran demi perbaikan pengendalian intern terhadap piutang usaha dimasa yang akan datang, sebagai berikut.

1. Agar perusahaan melakukan perbaikan terhadap struktur organisasinya sehingga terdapat pembagian tugas masing-masing bagian dan fungsional secara tegas.
2. Agar orang yang melaksanakan tugas fungsi kas (kasir) harus dipisahkan secara tegas dengan orang yang melaksanakan fungsi akuntansi (pencatatan) agar terjadi *internal check* dari kedua fungsi tersebut.
3. Agar orang yang melaksanakan tugas fungsi penjualan dipisahkan secara tegas dengan orang yang melakukan fungsi pengiriman dan fungsi penagihan.
4. Agar ada rotasi jabatan terhadap administrasi piutang usaha dan melakukan pemeriksaan secara berkala atau mendadak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Syafi'I Syakur, 2015, Intermediate Accounting, Edisi Revisi, Penerbit : Pembuka Cakrawala, Jakarta
- [2] Ersa Tri Wahyuni, dkk, 2009, Pengantar Akuntansi-Adaptasi Indonesia, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta
- [3] Firdaus A. Dunia, 2013, Pengantar Akuntansi, Edisi Keempat, Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- [4] Hery, 2013, Akuntansi Keuangan Menengah, Cetakan Pertama, Penerbit : CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta

- [5] Akuntansi Dasar 1 dan 2, Cetakan Kedua, Penerbit : PT. Grasindo, Anggota Ikapi, Jakarta
- [6] Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007, Standar Akuntansi Keuangan, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta
- [7] Iman Santoso, 2007, Akuntansi Keuangan Menengah, Cetakan Kesatu, Penerbit : PT. Refika Aditama, Bandung
- [8] I Cenik Ardana dan Hendro Lukman, 2016, Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Pertama, Penerbit : Mitra Wacana Media, Jakarta
- [9] Mulyadi, 2008, Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta Selatan
- [10] 2016, Sistem Akuntansi, Edisi 4, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta Selatan
- [11] Rudianto, 2012, Pengantar Akuntansi (Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Penerbit : Erlangga.
- [12] Slamet Sugiri Sodikin, 2013, Akuntansi Pengantar 2 Berbasis SAK ETAP 2009, Edisi 6 Cetakan Pertama, Penerbit : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.